



Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Himba Lestari di dalam Areal IUPHHK-HT di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur

Jerlita Kadang Allo¹, Muli Edwin^{2*}, Iin Sumbada Sulistyorini³

^{1,2,3}Program Studi Kehutanan, Sekolah Tinggi Pertanian (STIPER) Kutai Timur,

Email: ¹jerlitakadangallo@stiperkutim.ac.id, ^{2*}edwin.kutim@gmail.com, ³iinsumbada@stiperkutim.ac.id

Abstrak

Masyarakat setempat dalam tata kelola hutan merupakan pihak yang berkepentingan. Investasi di sektor kehutanan yang memanfaatkan kawasan seharusnya dapat membantu pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kondisi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di dalam kawasan hutan yang terdapat ijin usaha yaitu IUPHHK-HT. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menerapkan metode wawancara dalam pengumpulan data. Masyarakat di daerah studi merupakan pemukim lama yang sebagian besar pendatang dari luar daerah dengan tingkat pendidikan rendah dan status sosial yang rendah. Daerah studi merupakan desa persiapan yang memiliki infrastruktur air bersih, listrik, layanan pendidikan, kesehatan dan sarana prasarana umum masih sangat terbatas. Kehadiran perusahaan IUPHHK-HT belum mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat tersebut. Tingkat kesejahteraan masyarakat disana masih tergolong rendah. Padahal, tujuan Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) tidak hanya lestari produksi akan tetapi harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya. Kebijakan kesejahteraan sosial yang adil dan semangat reforma agraria seharusnya dapat menjawab tantangan ekonomi dan ekologi. Masyarakat setempat tidak semestinya dijadikan sebagai hambatan dalam pembangunan industri perkayuan di Indonesia.

Kata Kunci: Kawasan Hutan, Masyarakat, Kesejahteraan, Industri

Abstract

Local communities in forest management are interested parties. Investments in the forestry sector that utilize the area should be able to help regional development and improve the welfare of local communities. This study aims to understand the condition and level of community welfare in forest areas that have IUPHHK-HT. This research approach is descriptive qualitative by applying the interview method in data collection. The people in the study area are old settlers, most of whom are migrants from outside the area with low levels of education and low social status. The study area is a preparatory village that has very limited infrastructure for clean water, electricity, education, health and public infrastructure. The presence of the IUPHHK-HT company has not been able to provide welfare for the community. The level of social welfare there is still relatively low. In fact, the goal of Sustainable Forest Management (PHL) is not only sustainable production but must be able to provide economic, social and cultural benefits. Policy of fair social welfare and the spirit of agrarian reform should be able to answer economic and ecological challenges. The local community should not be used as an obstacle in the development of the timber industry in Indonesia.

Keywords: Forest Area, Community, Welfare, Industry

PENDAHULUAN

Ekstraksi sumber daya hutan di Indonesia dimulai sejak tahun 1970 berupa Hak Pengusahaan Hutan (PHH) melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1970 tentang Pengusahaan Hutan. Kemudian pertengahan tahun 1980 dimulai pembangunan hutan tanaman akibat meningkatnya kebutuhan kayu

industri dan menurunnya pasokan kayu alam (Indonesia Forest Watch, 2015). Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Indisutri (HPHTI) sudah tidak ditemukan lagi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang kemudian diubah menjadi PP No. 6 Tahun 2007. Istilah HPHTI menjadi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) (Yudhiwati, 2010).

Hutan menawarkan banyak manfaat yang sulit dipahami secara moneter. Berkonsultasi dengan masyarakat lokal sangat penting untuk mengetahui tentang apa yang penting bagi mereka atau tentang pilihan yang akan mereka buat dalam penggunaan sumber daya hutan (Sheil & Wunder, 2002). Masalah pengelolaan hutan masa lalu telah dipenuhi dengan dominasi konsesi yang berdampak pada tingginya deforestasi dan degradasi hutan, yang juga memicu konflik dengan masyarakat lokal. Konflik-konflik tersebut terutama terkait dengan hilangnya hak atas kawasan hutan dan keterbatasan akses bagi masyarakat sekitar dalam konsesi (Syukur *et al.*, 2015). Indonesia memiliki hutan tropis terbesar kedua di dunia dengan nilai ekonomi tinggi yang dapat dikelola oleh negara dan masyarakat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat (Rif'an *et al.*, 2016).

Sebelum tahun 1990-an, masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan tidak dianggap oleh negara memiliki potensi dan kapasitas untuk memainkan peran penting dalam manajemen hutan. Dari tahun 1990 hingga 1998, mulai tumbuhnya penerimaan dan kesadaran akan konsep bahwa masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan dapat berperan aktif dalam pengelolaan hutan. Dari 2007 hingga 2013, berbagai peraturan diumumkan untuk mendukung peran masyarakat dalam pengelolaan hutan (Ruandha *et al.*, 2018). Kemudian tahun 2015 pemerintah Indonesia telah bekerja untuk menyelesaikan konflik penguasaan lahan hutan dan membuat perubahan kebijakan yang meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan dengan penataan kepemilikan tanah yang adil dan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Indonesia juga memiliki sistem nasional wajib untuk sertifikasi kelestarian hutan dikenal sebagai PHPL (Hanif Faisol *et al.*, 2020). PHPL meliputi kriteria prasyarat, lestari Produksi, Ekologi, dan Sosial. Kunci keberhasilan kegiatan pemulihian hutan dengan melibatkan masyarakat. Masyarakat bisa menjadi mitra dalam pemulihian dan pengelolaan kawasan hutan sekaligus menjaga keberlangsungan fungsiannya (Widiarti, 2013).

Peran masyarakat setempat dalam tata kelola hutan sangat penting (Syukur *et al.*, 2015). Kebijakan IUPHHK (yang masih berjalan) belum memberikan peningkatan yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat untuk jangka panjang di Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur (Affandi, 2005). Masyarakat di dalam dan sekitar hutan secara fisik dan historis merupakan pihak yang berkepentingan dengan sumberdaya hutan (Syafaruddin *et al.*, 2014).

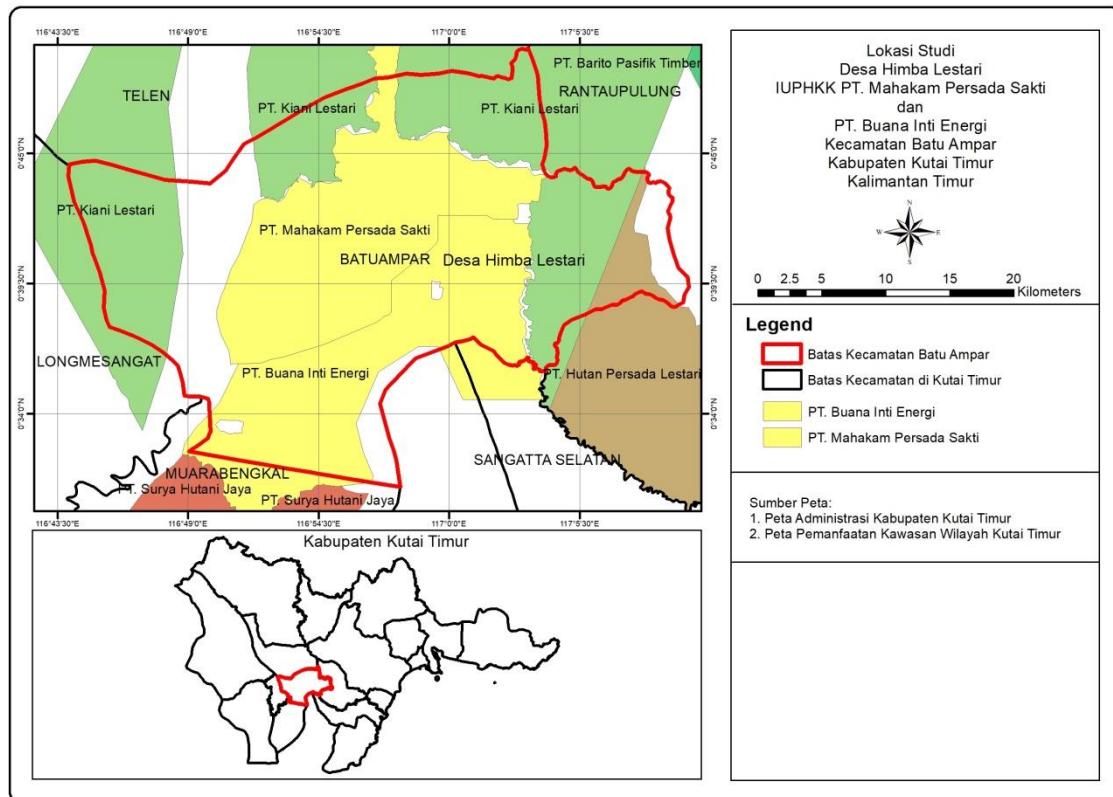
Badan Pusat Statistik dan Kementerian Kehutanan (2007 dan 2009), menyebutkan terdapat 25.863 desa yang berinteraksi dengan hutan dan 71,06 persen desa mengandalkan sumber daya hutan. Penduduk desa yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan adalah 37.197.508 atau 9.221.299 rumah tangga (KK), dan sekitar 1,7 juta keluarga (6,8 juta). Perusahaan Hutan Tanaman Industri di Kalimantan Timur sebanyak 41 (BPS Indonesia, 2020a) yang sebagian besar berada di Kutai Timur. Jumlah perusahaan IUPHHK-HT (HTI) di Kutai Timur sebanyak 14, dengan luasan total sebesar 391.455 ha (BPS Indonesia, 2020b).

Di Kecamatan Batu Ampar terdapat beberapa ijin konsesi IUPHHK-HT. Wilayah Kecamatan Batu Ampar, di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur sebagian besar masuk Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK). Perusahaan IUPHHK-HT di daerah tersebut antara lain adalah PT. Mahakam Persada Sakti (MPS) dan PT. Buana Inti Energi yang terletak di Desa Himba Lestari. Secara umum masyarakat desa tersebut memiliki kesejahteraan yang rendah seperti belum tersedianya fasilitas layanan listrik, air bersih dan akses jalan yang memadai. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu memahami kondisi masyarakat setempat dan bagaimana kesejahteraan masyarakat atas keberadaan IUPHHK-HT.

METODE

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian kurang lebih 6 bulan dari bulan November 2020 sampai Maret 2021. Kegiatan penelitian terdiri dari observasi lapangan, persiapan, pengumpulan dan pengolahan data, dan pelaporan hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan di desa Himba Lestari, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Lokasi desa tersebut berada di dalam ijin konsesi IUPHK (Gambar 1).



Gambar 1. Peta Lokasi Daerah Studi

B. Bahau dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah quisioner (daftar pertanyaan) digunakan untuk mendapatkan data primer dari responden yang merupakan data utama untuk dianalisis. Alat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari alat tulis, kamera, dan dokumen-dokumen serta peta sebagai pendukung penelitian.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data dan memahami fenomena tentang apa yang terjadi dan dialami oleh subjek penelitian. Deskriptif kuantitatif dalam hal ini merupakan gambaran dari hasil penggunaan instrumen yaitu wawancara, survei, dan dokumentasi dalam mengumpulkan data mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat.

D. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara observasi ke lokasi penelitian dengan mengadakan wawancara langsung dengan responden menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, laporan penelitian terdahulu dan sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode untuk pengumpulan data primer dan sekunder seperti observasi, wawancara secara langsung dan studi literatur. Khusus untuk data primer, metode yang digunakan adalah wawancara terstruktur untuk mengeksplorasi lebih dalam jawaban setiap Responden atau setiap pertanyaan yang disampaikan. Masyarakat di lokasi studi memiliki sebaran yang tidak merata dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit. Sebagian wilayah pemukiman di desa tersebut di luar IUPHKK-HT. Berdasarkan orientasi lapangan diketahui terdapat sekitar 92 rumah tangga, sehingga dalam penelitian ini diambil keseluruhan, yaitu 92 rumah tangga (Kepala Keluarga) sebagai Responden.

Unsur-unsur yang dinilai dalam penelitian ini adalah unsur yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Unsur-unsur tersebut seperti tingkat pendapatan, peluang usaha/pekerjaan, kesehatan, sarana dan prasarana, serta tingkat pengeluaran. seperti disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Unsur penting kesejahteraan masyarakat

NO	Faktor Kesejahteraan Masyarakat	Indikator Penilaian
1.	Pendapatan Masyarakat (Rp/bulan)	Rp. 1.000,000 – 2,500,000 Rp. 2.600,000 – 5.000,000 Rp. 5.100,000 – 7.000,000 Rp. 7.100,000 – 10.000.000 Rp. <10.000.000
2.	Kesempatan Bekerja/ Lapangan Pekerjaan Sampingan	- Kios / Toko Sembako - Depot Air Minum - Kios BBM - Tenaga Buru HTI - Beternak - Sampingan (Online)
3.	Kesehatan Masyarakat	- ISPA - Diare - Malaria - Penyakit Kulit - Asma - Mag
4.	Fasilitas Sarana dan Prasarana	- Sekolah - Puskesmas / Posyandu - Fasilitas Olahraga - Tempat Ibadah - Jalan - Listrik - Air bersih
5.	Lembaga Kemasyarakatan	- Kelompok Tani - Koperasi - Mitra

F. Analisis Data

Untuk analisis data tentang tingkat kesejahteraan masyarakat diukur menggunakan pendapat (Gilarso, 1992), sebagai berikut ini:

- a. Tingkat kesejahteraan rendah apabila pengeluaran > 75% dari pendapatan pertahun.
- b. Tingkat kesejahteraan sedang apabila pengeluaran 40- 75% dari pendapatan pertahun.
- c. Tingkat kesejahteraan tinggi apabila pengeluaran < 40% dari pendapatan pertahun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Kutai Timur memiliki luas 35.747,50 Km² merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai pada tahun 1999. Kutai Timur memiliki 18 kecamatan dan salah satunya adalah Kecamatan Batu Ampar dengan jumlah desa sebanyak 7 dan jumlah penduduk sebanyak 6.143 jiwa (BPS Kutai Timur, 2020). Pada desa studi, yaitu Himba Lestari di Kecamatan Batu Ampar memiliki luas 116.7 Km² dengan jumlah penduduk sebesar 1.004 jiwa. Penduduk di Himba Lestari masih sangat sedikit dengan kepadatan sebesar 9 jiwa/km² (BPS Kutai Timur, 2019).

Desa tersebut awalnya merupakan pemukiman transmigrasi pada masa pemerintahan Orde Lama. Pada saat itu juga terdapat ijin konsesi HPH, yaitu PT. Kiani Lestari. Setelah perusahaan HPH tersebut tidak aktif lagi seiring waktu pemukiman transmigrasi banyak ditinggalkan atau para pemukim banyak yang pindah tempat. Kemudian setelah pemekaran Kutai Timur desa tersebut mulai banyak dihuni oleh para pendatang dari luar daerah. Karena semakin ramainya kepadudukan di desa tersebut akhirnya pada tahun 2004 pemerintah Kutai Timur memasukkan desa tersebut secara administrasi sebagai desa persiapan. Sampai saat ini wilayah desa tersebut hampir keseluruhannya masuk wilayah KBK. Sehingga secara keseluruhan di desa tersebut juga masuk dalam IUPHHK-HT, khususnya PT. Mahakam Persada Sakti dan PT. Buana Inti Energi (Gambar 1) yang saat ini sedang aktif sejak ijin dikeluarkan tahun 2010.

A. Kondisi Umum Responden

Dari total 1.004 jiwa penduduk di desa studi tidak semuanya bermukim di areal konsesi IUPHHK-HT. Pada desa tersebut terdapat empat Rukun Tetangga (RT) yang masuk wilayah ijin HTI yang dalam penelitian ini setiap rumah tangga dijadikan sebagai Responden. Responden masyarakat setempat memiliki

rentang usia 21 sampai 75 tahun sebagaimana dikemukakan pada Tabel 2. Tingkat pendidikan responden sebagian besar hanya pada tingkat sekolah dasar atau masuk kategori masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah.

Tabel 2. Pengelompokan Responden Berdasarkan Usia

Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah Responden	Presentase
21-29	16	17,39
30-38	23	25%
39-47	21	22,83
48-56	14	15,22
57-65	10	10,87
≥ 66	8	8,69
Total	92	100

Sebagian besar responden merupakan pendatang dari luar daerah seperti dari Sulawesi, Jawa, dan Kalimantan di luar Kutai Timur. Mereka telah bermukim dan memanfaatkan lahan disana sekitar 4 sampai 7 tahun dan sudah memiliki identitas sebagai warga Kutai Timur. Responden berada pada usia produktif yaitu 30 sampai 46 tahun (Tabel 2). Mata Pencaharian terbanyak dari responden adalah sebagai petani atau berkebun (87 orang) dengan sumber penghasilan utama komoditi karet, kelapa sawit, lada dan hortikultura (buah-buahan, sayur-sayuran dan rempah-rempahan). Sebagian kecil responden berprofesi sebagai guru honor 2 orang, guru mengaji 1 orang, dan yang bekerja di pemerintahan desa 2 orang.

Masyarakat Himba Lestari selain memiliki pekerjaan utama seperti yang telah disebutkan diatas mereka juga memiliki pekerjaan sampingan lainnya yaitu ada yang memiliki kios sembako, beternak kambing, beternak ayam dan bebek, memiliki depot air minum, dan membuat keripik dengan bahan dasar dari kebun sendiri. Dari data penelitian menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat hidup dengan mengandalkan hasil berkebun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Di desa studi hanya memiliki 2 fasilitas pendidikan, yaitu sekolah dasar SDN 006 Batu Ampar dan Pendidikan Anak Sekolah Dini (Paud) ada 2 yaitu yang pertama PAUD II yang berada di RT 01 dan yang kedua berada di RT 04. Sarana kesehatan yang tersedia disana adalah Puskesmas Pembantu (Pusban) (Gambar 2). Keberadaan Puskesmas tersebut dari pemerintah daerah sangat membantu masyarakat terkait layanan kesehatan. Layanan pendidikan dan kesehatan disana masih sangat terbatas. Kemudian juga jarak tempuh atau akses untuk mendapatkan layanan tersebut juga sangat sulit. Akses untuk sekolah menengah pertama dan atas harus menempuh jarak yang jauh karena berada di luar wilayah desa studi.



Gambar 2. SDN 006 Batu Ampar (a), Puskesmas Pembantu (b)

Sarana dan prasarana lainnya seperti transportasi antar desa adalah melalui darat. Di desa studi tidak terdapat angkutan umum, masyarakat sebagian besar menggunakan kendaraan pribadi terutama motor untuk beraktivitas. Akses jalan yang merupakan jalan utama (poros) merupakan jalan logging peninggalan

HPH PT. Kiani Lestari yang oleh pemerintah daerah dibangun sebagai jalan arteri dan pernah diaspal untuk memudahkan akses antar desa dan antar kecamatan di daerah pedalaman Kutai Timur. Sarana dan prasarana umum seperti Sekolah Dasar (SD), fasilitas kesehatan yaitu Puskesmas Pembantu (Pusban) serta fasilitas peribadatan berupa masjid, langgar dan gereja merupakan pembangunan dari pemerintah daerah atau pemerintah desa.

Pada desa studi terdapat beberapa kelompok tani diantaranya yaitu Kelompok Tani Beringin Baru, Kelompok Tani Cahaya Makmur yang berada di RT 02, kemudian Kelompok Tani Quari Makmur dan Kelompok Tani Quari Bersatu yang juga berada di RT 06. Selanjutnya Kelompok Tani Maju Jaya yang berada di RT 03 dan yang terakhir yaitu Kelompok Tani Turatea Lestari di RT 01. Kehadiran lembaga kemasyarakatan ataupun kelompok tani tersebut merupakan sistem norma yang memiliki tujuan untuk mengatur tindakan-tindakan maupun kegiatan anggota masyarakat dalam kehidupan dan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia.

B. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan dapat dicapai dengan mengurangi jumlah masyarakat yang miskin, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan inklusi sosial (Greve, 2008). Sejak tahun 1960-an PBB telah mengangkat masalah kesejahteraan sosial sebagai salah satu kegiatan masyarakat internasional. PBB mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan yang diselenggarakan untuk membantu individu atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan kepentingan keluarga dan masyarakat (Suharto, 2009). Banyak negara tropis terus menyerahkan pengelolaan hutan kepada masyarakat penghuni hutan. Asumsinya adalah bahwa pengetahuan lokal tentang hutan dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan akan memberikan banyak manfaat sosial dan lingkungan, seperti pengentasan kemiskinan pengurangan deforestasi dan kebakaran. Namun, bukti untuk ini masih sedikit (Meijaard *et al.*, 2021).

Pendapatan Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata pendapatan masyarakat pada tingkat rumah tangga per-tahun yaitu sebesar Rp. 48.169.562,-. Pendapatan paling rendah dari 92 responden adalah Rp 6 juta/thn dan tertinggi mencapai Rp 180 juta/thn. Pendapatan masyarakat tersebut diperoleh dari sumber penghasilan utama seperti usaha atau toko sembako, usaha perkebunan (Kelapa Sawit, dan Lada) dan usaha pertanian. Masyarakat petani di lokasi studi menanam berbagai macam tanaman untuk kebutuhan hidup seperti padi, jengkol, pete, durian, pepaya, pisang, sayur-sayuran, lombok dan lain-lain.

Tabel 3. Pendapatan Per-Tahun Responden di Lokasi Studi

No.	Pendapatan (Rp)	Jumlah Responden	Percentase
1	12.000.000 - 30.000.000	77	83,70
2	31.200.000 - 60.000.000	13	14,13
3	61.200.000 - 84.000.000	0	0,00
4	85.200.000 - 120.000.000	0	0,00
5	> 120.000.000	2	2,17
Jumlah Total		92	100

Pada Tabel 3 tersebut telah menjelaskan sebagian besar atau sekitar 83% masyarakat di lokasi studi berdasarkan data responden memiliki pendapatan yang rendah. Rumah tangga yang banyak memiliki pendapatan yang rendah terutama masyarakat petani yang hanya mengandalkan usaha bercocok tanam untuk keperluan sehari-hari dan tidak memiliki usaha sampingan lainnya. Dari total jumlah responden terdapat 92% merupakan petani atau usaha berkebun (Tabel 4).

Tabel 4. Jenis Usaha/Pekerjaan dan Jumlah Responden di Lokasi Studi

No.	Jenis usaha/pekerjaan	Jumlah	Percentase
1	Petani/Berkebun	85	92,39
2	Kios/toko sembako	1	1,09
3	Bengkel motor	1	1,09
4	Guru (Guru honor/Guru Ngaji)	3	3,26
5	Perangkat Desa	2	2,17

Jumlah Total		92	100
Dari total jumlah responden terdapat 48 rumah tangga yang memiliki usaha sampingan. Usaha sampingan yang banyak dilakukan adalah kios sembako dan beternak Ayam (Tabel 5). Usaha sampingan khususnya beternak atau memelihara Sapi, Kambing, Bebek dan Ayam bukan peternakan dalam skala besar, sehingga usaha tersebut belum dapat menopang kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat disana tetap mengutamakan usaha dengan memperdayakan lahan melalui bercocok tanam sebagai usaha utama. Kondisi tersebut harusnya menjadi modal bagi pemegang konsesi melalui program Pembinaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM). Masyarakat tidak harus menanam tanaman pokok HTI (skema kerjasama atau perhutanan sosial) tetapi diberdayakan juga menanam jenis lainnya yang dapat bermanfaat bagi kebutuhan hidup dan bagi konservasi seperti jenis-jenis <i>Multi Porpuse Tree Species</i> (MPTS). Berdasarkan hasil penelitian ditemukan berbagai jenis MPTS yang ditanam masyarakat pada lahan Garapan di dalam ijin konsesi seperti jenis Matoa, Karet, Jengkol, Petai, Durian, Mangga, Jambu Biji, dan Nangka.			
MPTS merupakan tanaman multi guna yang dapat menghasilkan daun, kayu, dan buah. Tanaman MPTS dapat ditanam di kawasan hutan, sebagai alternatif pengganti fungsi ekonomi bagi masyarakat desa hutan disamping fungsi konservasi. Menurut peraturan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indoensia Nomor P.12/Menhut-II/2013, bahwa MPTS bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mendukung pemulihan fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS). Daerah desa studi atau lokasi IUPHHK-HT merupakan hulu DAS Sangatta. Hulu DAS seharusnya diperuntukkan sebagai daerah serapan air atau dilindungi. Pemanfaatan lahan pada hulu DAS mestinya tidak secara monokultur tetapi dengan menerapkan pola tumpang sari (<i>agroforestry</i>).			
Tabel 5. Jenis Usaha/Pekerjaan Sampingan dan Jumlah Responden di Lokasi Studi			
No	Jenis Usaha Sampingan	Total	Percentase
1	Kios Sembako (Pengecer kecil barang-barang rumah tangga)	14	15,22
2	Kios BBM	1	1,09
3	Bengkel	1	1,09
4	Berkebun	1	1,09
5	Chainsaw-man	1	1,09
6	Depot Air Minum	1	1,09
7	Beternak Sapi	1	1,09
8	Beternak Kambing	4	4,35
9	Membuat Keripik	2	2,17
10	Beternak Ayam	17	18,48
12	Beternak Ayam, Kambing	3	3,26
13	Beternak Ayam, bebek	2	2,17
Jumlah Total		48	

Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat seperti memenuhi kebutuhan akan obat-obatan dan akses terhadap layanan kesehatan. Masyarakat lokasi studi sangat jauh dari ibukota Kabupaten, sehingga untuk mendapatkan layanan seperti rumah sakit menempuh perjalanan yang jauh dan biaya yang relatif tinggi. Kehadiran perusahaan di lokasi studi semestinya dapat menjadikan hal tersebut sebagai tanggungjawab sosial kepada masyarakat setempat seperti pemberian layanan klinik kesehatan gratis dan layanan transportasi warga untuk mengakses rumah sakit di kota.

Tabel 6. Jenis Penyakit dari Responden di Lokasi Studi			
No	Jenis Penyakit	Jumlah	Percentase
1	Maag	9	9,78
2	Asma	3	3,26
3	Penyakit Kulit	4	4,35
4	Paru-paru	1	1,09
5	Batuk/pilek	5	5,43
6	Hepatitis	1	1,09

7	Diabetes	1	1,09
8	Sakit Gigi	1	1,09
9	Diare	2	2,17
10	Ispa	1	1,09
11	Tekanan Darah	1	1,09
12	Malaria	2	2,17
Jumlah Total		31	

Pada Tabel 6 di atas terdapat 31 responden yang menderita penyakit tertentu. Penyakit yang diderita tertinggi adalah maag, batuk/pilek dan penyakit kulit. Bagian lain yang berhubungan dengan kesejahteraan adalah kesehatan. Kesehatan merupakan modal utama bagi seseorang untuk dapat hidup produktif, yaitu paling minimal adalah bebas dari penyakit.

Tingkat kesejahteraan masyarakat di lokasi studi berdasarkan pendapatan dan pengeluaran per-tahun tergolong rendah (Tabel 7) atau memiliki pengeluaran hampir sama dengan pendapatan. Berdasarkan perhitungan ditemukan 78,3% masyarakat disana memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah dan hanya 1% yang memiliki tingkat kesejahteraan tinggi. Kondisi masyarakat tersebut dapat dikatakan sebagai masyarakat miskin. Fenomena ini harus menjadi perhatian pemangku kepentingan baik pemegang konsesi maupun pemerintah daerah. Pengentasan kemiskinan merupakan isu nasional yang juga harus dijadikan sebagai isu strategis dalam pembangunan di daerah.

Tabel 7. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Lokasi Studi

No.	Tingkat Kesejahteraan	Jumlah Responden	Percentase
1	Rendah (> 75%)	72	78,26
2	Sedang (40-75%)	19	20,65
3	Tinggi (< 40%)	1	1,09

Berdasarkan hasil penelitian telah menunjukkan keberadaan IUPHHK-HT di lokasi studi belum mampu mensejahterakan masyarakat setempat. Padahal, pengelolaan hutan berkelanjutan harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, budaya serta pengakuan terhadap kearifan lokal dalam mengelola lingkungan hutan. Pada prinsipnya masyarakat yang tinggal di dalam kawasan atau memanfaatkan kawasan hutan (KBK) dilarang oleh pemerintah berdasarkan peraturan terkait, akan tetapi adanya semangat reformasi agraria dan Perhutanan Sosial (PS) serta tuntutan keadilan sosial, maka masyarakat di dalam dan sekitar hutan tidak lagi menjadi penonton dan miskin. (Wahyu *et al.*, 2020) menjelaskan bahwa perkembangan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) di Indonesia telah memperoleh momentumnya terutama dalam lima tahun terakhir. Tidak dapat dipungkiri bahwa PHBM telah menjadi pendekatan kunci untuk memelihara dan meningkatkan kondisi hutan dan kesejahteraan masyarakat.

C. Peran IUPHHK-HT terhadap Kesejahteraan Masyarakat

IUPHHK-HT di lokasi studi telah berjalan kurang lebih 9 tahun sejak diberikan ijin lokasi pada tahun 2010. Lamanya perusahaan beroperasi di suatu daerah seharusnya sudah dapat memberikan manfaat terutama kesejahteraan masyarakat setempat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak PT. Mahakam Persada Sakti bantuan yang pernah diberikan dari perusahaan kepada masyarakat yaitu bantuan air bersih, hewan kurban, bantuan covid (sembako), dan bantuan ekonomi (bibit lele). Sementara program lainnya seperti pembinaan terhadap masyarakat belum pernah dilakukan khususnya yang berhubungan dengan peningkatan usaha yang dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Hasil wawancara dengan masyarakat di Desa Himba Lestari diketahui bahwasanya keberadaan perusahaan tersebut tidak memberikan pengaruh terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Dari 92 responden yang diwawancara tidak ada yang bekerja di Perusahaan IUPHHK-HT, mereka sebagian besar bekerja di lahan kebun atau lahan garapan mereka masing-masing. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak pemegang IUPHHK-HT disana pernah beberapa kali terjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan terkait lahan garapan yang dikuasai oleh masyarakat. Dari pengembangan atas jawaban kepada Responden dijelaskan bahwa perusahaan beberapa kali melakukan pengusuran terhadap lahan yang sudah ada kebun atau tanaman masyarakat (Gambar 3b), sehingga memicu terjadinya konflik.



Gambar 3. Kebun Masyarakat dengan Berbagai Jenis Tanaman (a),
Areal Pemakaman yang Telah di *Land Clearing* Perusahaan (b)

Penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah terkait dengan pelaksanaan pembangunan memerlukan dukungan semua pihak dalam bentuk bentuk partisipasi dari masyarakat maupun pemangku kepentingan, seperti perusahaan. Oleh karena itu beban tanggung jawab sosial termasuk kesejahteraan masyarakat bukan hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah tetapi juga merupakan beban perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tahun Perseroan Terbatas telah menegaskan bahwa perusahaan yang menjalankan bidang usaha dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam atau perusahaan penanaman modal wajib menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2007). Hal tersebut juga telah diperjelas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJS) Perseroan Terbatas (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2012). Kabupaten Kutai Timur sendiri telah memiliki Peraturan Daerah tentang TJS, yaitu Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2017. Adanya peraturan daerah tersebut dan semangat otonomi daerah sudah seharusnya pemerintah daerah dan perusahaan IUPHHK-HT di daerah lebih banyak berperan dalam mewujudkan pembangunan daerah khususnya yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Banyak negara tropis telah menyerahkan pengelolaan hutan kepada komunitas penghuni hutan. Asumsinya adalah bahwa pengetahuan lokal tentang hutan dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan akan mencapai berbagai aspek sosial dan lingkungan (Meijaard *et al.*, 2021). Masyarakat harus memperoleh akses dan insentif yang sebesar-besarnya untuk mengelola usaha kehutanan sebagai sumber kehidupan sekaligus mencegah kerusakan. Semangat reforma agraria semakin diminati oleh masyarakat dan hak untuk mengelola lahan di dalam kawasan harus sesuai dengan kearifan lokal yang mampu menjawab tantangan ekonomi dan ekologi (Pambudi, 2020). Kebijakan kesejahteraan sosial harus ditempatkan secara integratif dalam rangkaian kebijakan yang lebih luas tentang pembangunan ekonomi, program ketenagakerjaan, kebijakan pendidikan dan kesehatan dalam mendorong pertumbuhan yang merata, adil dan berkelanjutan (Suharto, 2009).

KESIMPULAN

Masyarakat Desa Himba Lestari yang bermukim atau mengarap lahan di dalam areal konsesi IUPHHK-HT sebagian besar merupakan masyarakat pendatang dari luar daerah dengan kondisi relatif heterogen, memiliki tingkat pendidikan rendah, status sosial yang rendah, tingkat kesehatan yang cukup baik dan sebagian besar berusia produktif. Keberadaan IUPHHK-HT di lokasi studi belum mampu mensejahterakan masyarakat setempat. Tingkat kesejahteraan masyarakat masih tergolong rendah. Sebagian besar masyarakat pada tingkat rumah tangga memiliki pendapatan yang berkisar Rp 1.000.000,- sampai 1.500.000,-/bulan. Pendapatan masyarakat ditunjang dari pekerjaan utama sebagai petani atau berkebun.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Ketua STIPER Kutai Timur yang telah memberikan kesempatan dan ijin untuk melakukan penelitian. Terima kasih kami sampaikan kepada masyarakat Desa Himba Lestari atas partisipasi mereka sehingga penelitian ini berjalan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, O. (2005). *Dampak Kebijakan IPPK dan IUPHHK terhadap Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Malinau*. Retrieved from CIFOR, Governance Brief, Jakarta:
- BPS Indonesia. (2020a). *Direktori Perusahaan Kehutanan 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, Indonesia
- BPS Indonesia. (2020b). *Statistik Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2020*. Samarinda: Badan Pusat Statistik, Kalimantan Timur
- BPS Kutai Timur. (2019). *Kecamatan Batu Ampar Dalam Angka 2019*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur
- BPS Kutai Timur. (2020). *Kutai Timur Dalam Angka 2020*. Sangatta: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur
- Gilarso, T. (1992). *Pengantar Ilmu Ekonomi bagian Makro*. Yogyakarta: Kanisius.
- Greve, B. (2008). What is Welfare? *Central European Journal of Public Policy*, 2(01), 50-73.
- Hanif Faisol, N., Kustanta Budi, P., Belinda Arunarwati, M., Ary, S., Erik Teguh, P., & Triyono, S. (2020). *Indonesia Forest State 2020*. Jakarta: Ministry of Environment and Forestry, Republic of Indonesia
- Indonesia Forest Watch. (2015). Pelanggaran Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Pembiayaan. In: FWI, Koalisi Responsi Bank Indonesia.
- Meijaard, E., Santika, T., Wilson, K. A., Budiharta, S., Kusworo, A., Law, E. A., . . . Sherman, J. (2021). Toward Improved Impact Evaluation of Community Forest Management in Indonesia. *Conservation Science Practice*, 3(1), 1-14. doi:<https://doi.org/10.1111/csp2.189>
- Pambudi, A. S. (2020). The Development of Social Forestry in Indonesia. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 1(1), 57-66. doi:<https://doi.org/10.46456/jisdep.v1i1.11>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Perseroan Terbatas*. Jakarta: (UU Nomor 40 Tahun 2007)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2012). *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas*. Jakarta: (PP Nomor 47 Tahun 2012)
- Rifan, M., Setiawan, H., & Wisnuaji, A. (2016). The Role of the Village in Forest Management: Human Rights Perspectives. *Brawijaya Law Journal*, 3(1), 79-94.
- Ruandha, A., Yuyu, R., Triyono, S., Roosi, T., Dhany, R., & Mursid, W. (2018). *Indonesia Forest State 2018*. Jakarta: Ministry of Environment and Forestry, Republic of Indonesia
- Sheil, D., & Wunder, S. J. C. E. (2002). The Value of Tropical Forest to Local Communities: Complications, Caveats, and Cautions. *Conservation Ecology*, 6(2), : 9. doi:DOI: 10.5751/ES-00458-060209
- Suharto, E. (2009). *Development of Social Welfare in Indonesia*. Paper presented at the International Conference on Building Capacity and Policy Networking for Effective Welfare Development, Jakarta, Indonesia.
- Syafaruddin, Yusra, A. H. A., & Radian. (2014). Dampak Keberadaan Hutan Tanaman Industri PT. Wana Subur Lestari terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sungai Radak II Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Social Economic of Agriculture*, 3(2), 68-76. doi:DOI: <http://dx.doi.org/10.26418/j.sea.v3i2.9057>
- Syukur, A., Tao, A., Prameswari, A., Kiki, A., Jauhari, A., Fatrysa, C., . . . Berliani, H. (2015). *Forest for People's Welfare: Stories From the Field*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, (Partnership for Governance Reform in Indonesia).
- Wahyu, A., Suharjito, D., Darusman, D., & Syaufina, L. (2020). *The Development of Community-Based Forest Management in Indonesia and Its Contribution to Community Welfare and Forest Condition*. Paper presented at the IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.
- Widiarti, A. (2013). Pemulihan Hutan dengan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam*, 10(2), 215-228. doi:DOI: <https://doi.org/10.20886/jphka.2013.10.2.215-228>
- Yudhiwati, A. (2010). *Pengambilalihan Saham Perseroan Terbatas Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)*. (Desertasi Doktor), Universitas Diponegoro Semarang.